

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang paling utama bagi setiap orang, kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Seperti dalam (Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 1992) yang menjelaskan bahwa Kesehatan merupakan hak asasi dan sekaligus merupakan investasi, sehingga mewajibkan setiap individu dan seluruh komponen masyarakat untuk mengusahakan, memperjuangkan dan meningkatkan kesehatan bangsa dan negara. Dengan cara ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati hidup sehat dan akhirnya mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. (Departemen Kesehatan RI, 2006).

Indonesia pada saat ini masih menghadapi berbagai kendala dalam pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya dalam bidang kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dipengaruhi oleh kualitas manusia sejak masih dalam kandungan hingga usia balita, yang merupakan masa kritis bagi kehidupan dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Azwar, Asrul (1972) menyatakan, Puskesmas suatu lembaga atau organisasi fungsional yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja tertentu, meliputi: (1) pengobatan; (2) kesejahteraan ibu, anak dan keluarga berencana; (3) pemberantasan penyakit menular; (4) kesehatan lingkungan; (5) pendidikan kesehatan masyarakat; (6) pengumpulan data untuk perencanaan dan penilaian.

Salah satu kendala utama di awal berdirinya puskesmas adalah rendahnya respon masyarakat yang awalnya hanya mengetahui tentang sistem pengobatan tradisional. Dengan kata lain, orang-orang dalam suku-bangsa, sub-etnis, atau kelompok-kelompok tertentu, dengan identitas budayanya sendiri, memiliki dan mengembangkan sistem medis mereka sendiri dari generasi ke generasi sebagai bagian dari budaya mereka, termasuk pengobatan tradisional dengan berbagai keterampilan serta teknik terapi yang berbeda pula (Foster dan Anderson, 1986). Beberapa unsur sistem pengobatan tradisional masih ada dari waktu ke waktu, sementara yang lain merupakan unsur baru yang diperkaya, dimodifikasi atau diubah dari unsur yang lama.

Puskesmas merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, dengan kata lain sebagai salah satu wujud upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas minimal melakukan kegiatan kesehatan bagi masyarakat desa berupa pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensinya (pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu menyusui, pelayanan kesehatan anak, penemuan dan penanganan penyakit) dan menumbuhkan kembangkan UKBM lain yang dibutuhkan oleh masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2011: 183).

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita (Kementrian Kesehatan

RI, 2012: 2). Upaya pengembangan kualitas SDM dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan layanan tumbuh kembang anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan nifas.

Jika kita melihat kembali sejarah posyandu, pada tahun 1975 Departemen kesehatan Republik Indonesia menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) sebagai bagian dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Kegiatan awal PKMD adalah perbaikan gizi melalui balita, pencegahan diare melalui posyandu, pengobatan masyarakat pedesaan melalui posyandu, serta imunisasi dan KB melalui posko imunisasi dan desa. Pada tahun 1984, menteri kesehatan kepala BKKBN dan menteri dalam negeri mengeluarkan arahan bersama untuk mengkonsolidasikan berbagai kegiatan masyarakat ke dalam wadah yang dikenal sebagai posyandu. Kegiatan yang dilakukan dan bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi sesuai dengan dengan konsep GOBI-3F (*Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breast Feeding, Immunization, Female Education, Famil Planning, and Food Supplement*), untuk Indonesia diterjemahkan dalam 5 kegiatan Posyandu, yaitu KIA, KB, Imunisasi, Gizi, dan penanggulangan Diare.

Posyandu pertama kali dicanangkan oleh kepala Republik Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1986, bertepatan dengan peringatan hari kesehatan nasional. Pada tahun 1990 diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) No. 9 Tahun 1990 tentang peningkatan mutu posyandu. Pelayanan yang diberikan oleh posyandu bersifat terpadu dan dirancang untuk memberikan kemudahan dan

manfaat bagi masyarakat, karena pelayanan yang lengkap tersedia pada waktu dan tempat yang sama dalam masyarakat (Depkes RI, 1990). Karena posyandu merupakan wahana pelayanan berbagai program, maka penyelenggaraan posyandu perlu selalu menyertakan aspek pemberdayaan masyarakat. Aspek pemberdayaan masyarakat menjadi fokus upaya peningkatan posyandu, dan dalam pelaksanaannya perlu terus mendapat bantuan teknis dari pemerintah dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Posyandu sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam bidang kesehatan melaksanakan pelayanan KB, gizi, imunisasi, penanggulangan diare, dan (Program Kesehatan Ibu dan Anak) KIA. Upaya keterpaduan pelayanan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tujuan didirikannya Posyandu adalah untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita, angka kelahiran agar terwujud keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dengan demikian Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan (Saepudin dkk, 2017).

Faktor-faktor penghambat tujuan pembangunan khususnya di bidang kesehatan posyandu di Gampong Teupin Siron adalah pengetahuan warga, kebiasaan warga, kesadaran, dan sikap serta kemampuan keuangan dari masyarakat. Hal ini berarti menimbulkan terjadinya masalah antara apa yang menjadi harapan dan kenyataan. Semuanya itu akan membawa pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dilihat dari kepentingan masyarakat, pembangunan kesehatan masyarakat desa merupakan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat sehingga kesehatan dan gizi masyarakat semakin membaik.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam bidang kesehatan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat yang bersangkutan. Menyadari akan arti pentingnya peran masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan diperlukan adanya agen-agen pembangunan yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan akan pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Gampong Teupin Siron tidak bisa lepas dari berbagai dukungan dan peran aktif yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini peran yang besar adalah peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang secara langsung berhadapan dengan berbagai permasalahan kemasyarakatan termasuk masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Posyandu dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan Masyarakat Gampong Teupin Siron, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai posyandu di Gampong Teupin Siron?
- b. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui posyandu?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai upaya yang dilakukan baik itu oleh Bidan, Kader Posyandu, maupun masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui Posyandu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu adalah:

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai posyandu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Gampong Teupin Siron!
- b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui posyandu!

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang pelayanan posyandu, partisipasi masyarakat dan tumbuh kembang balita peserta posyandu.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan, pengetahuan serta informasi kepada posyandu yang masih berada dalam pratama, madiya, dan mandiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan balita.